BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

KORUPSI

KORUPSI telah merasuki seluruh aspek kehidupan masy. Sehingga membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat

KORUPSI *adalah* **kejahatan luar biasa**

Pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami bbg hambatan shg perlu metode **penegakan hukum secara luar biasa**, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan

GUNUNG ES KORUPSI

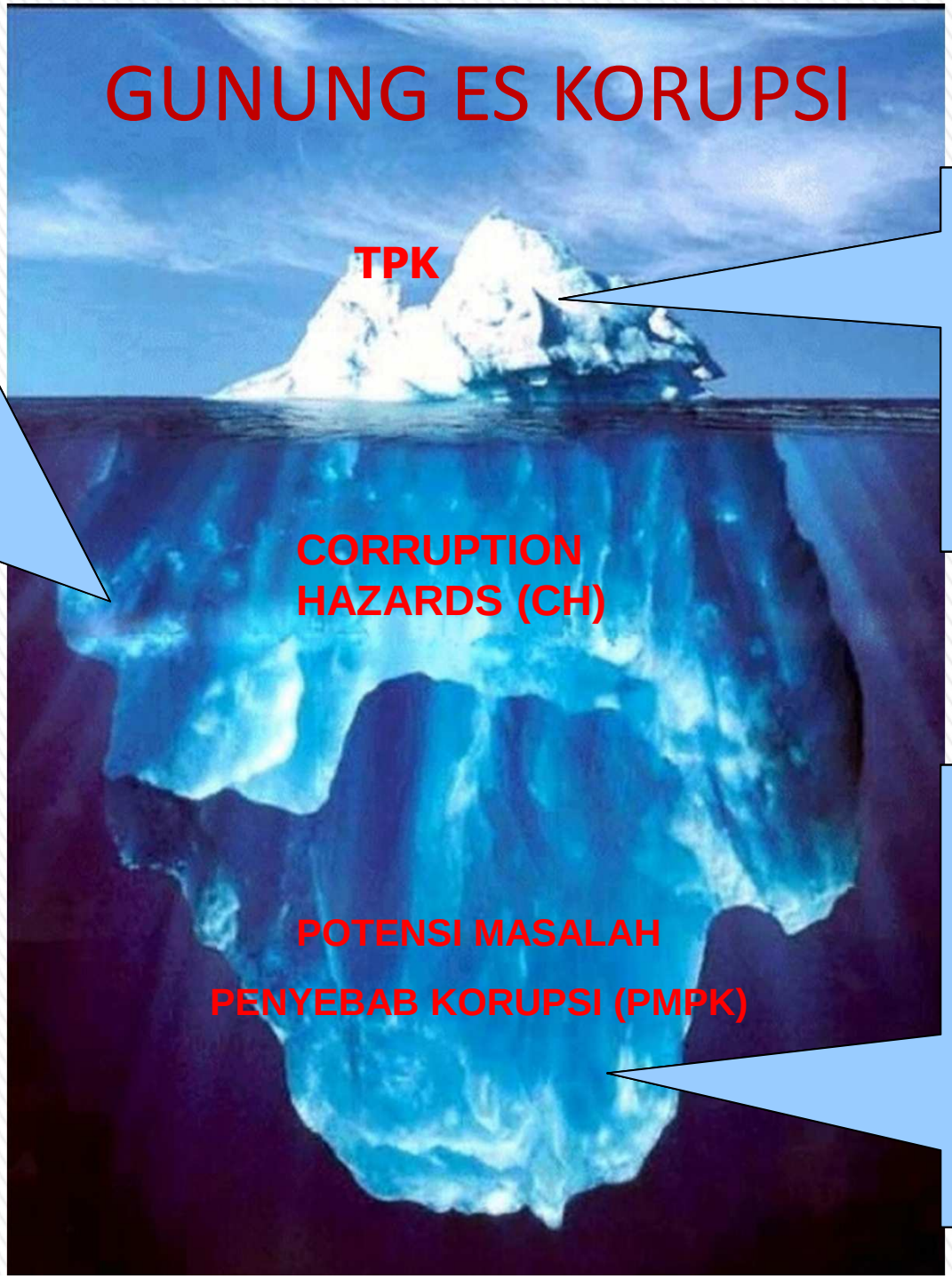

- lokasi :
- pemasok anggaran
- pengguna anggaran,
- disparitas pendapatan
- manusia (berjiwa koruptor)
- barang (asset neg, br sitaan)
- kegiatan :
- proyek pembangunan
- pengadaan barang / jasa
- perijinan / yan publik

Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :

- NIAT
- KEMAMPUAN
- PELUANG
- TARGET YG SESUAI

Kelemahan bangsa

- Kesisteman
- Kesejahteraan / Pengghasilan
- Mental / moral
- Internal, sosial, self control
- Budaya ketaatan hukum

PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

TUGAS POKOK POLRI, PSL 13 UU NO.2 THN 2002

1) HAR KAMTIBMAS
2) GAKKUM
3) BERI PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KPD MASY

TUGAS POKOK DIBIDANG PENEGAKAN HUKUM ; (DASAR PSL 16 UU NO.2 THN 2002) TUGAS DAN WEWENANG POLRI DLM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SELURUH TINDAK PIDANA.

STRATEGI POLRI DLM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1) SINERGITAS DGN APH DLM CJS MAUPUN DGN KPK
2) MENINGKATKAN FUNGSI KOORDINASI DLM KEGIATAN LIDIK DAN SIDIK TPK
3) FOKUS LAKS LIDIK DAN SIDIK DI 10 AREA RAWAN TPK
4) MERESPON TUNTUTAN MASYARAKAT UTK MELAKS PERCEPATAN SIDIK TPK DLM KORIDOR *DUE PROCESS OF LAW* (PROSES HUKUM YG BENAR)

10 AREA RAWAN TINDAK PIDANA KORUPSI

AMANAT DARI INPRES NOMOR 9 THN 2011 DAN INPRES NOMOR 17 THN 2011 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI THN 2012

1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2. KEUANGAN DAN PERBANKAN
3. PERPAJAKAN
4. MINYAK DAN GAS BUMI
5. BUMN DAN BUMD
6. KEPABEANAN DAN CUKAI
7. PENGELOLAAN APABN DAN APBD
8. ASET NEGARA DAN ASET DAERAH
9. PERTAMBANGAN
10. PELAYANAN UMUM

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

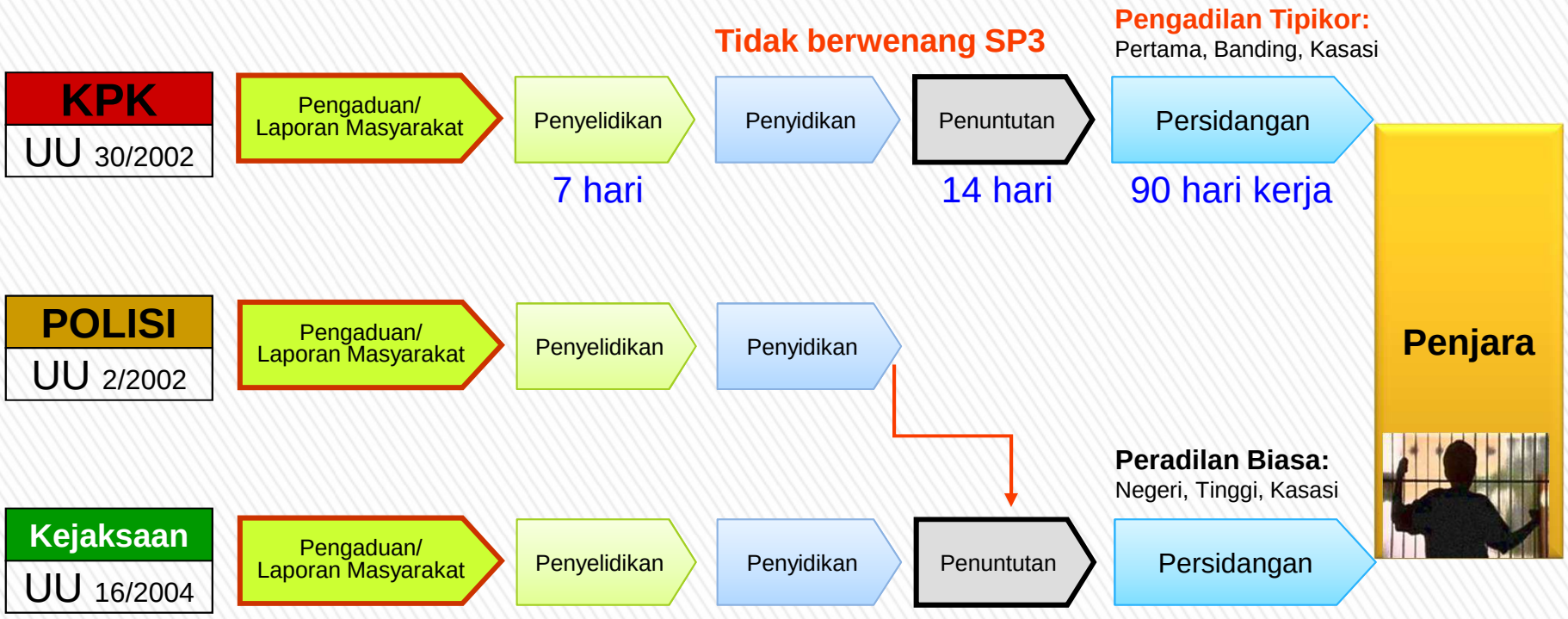

Kita semua harus menjadi Subyek Pemberantasan Korupsi

Komitmen Semua Pihak

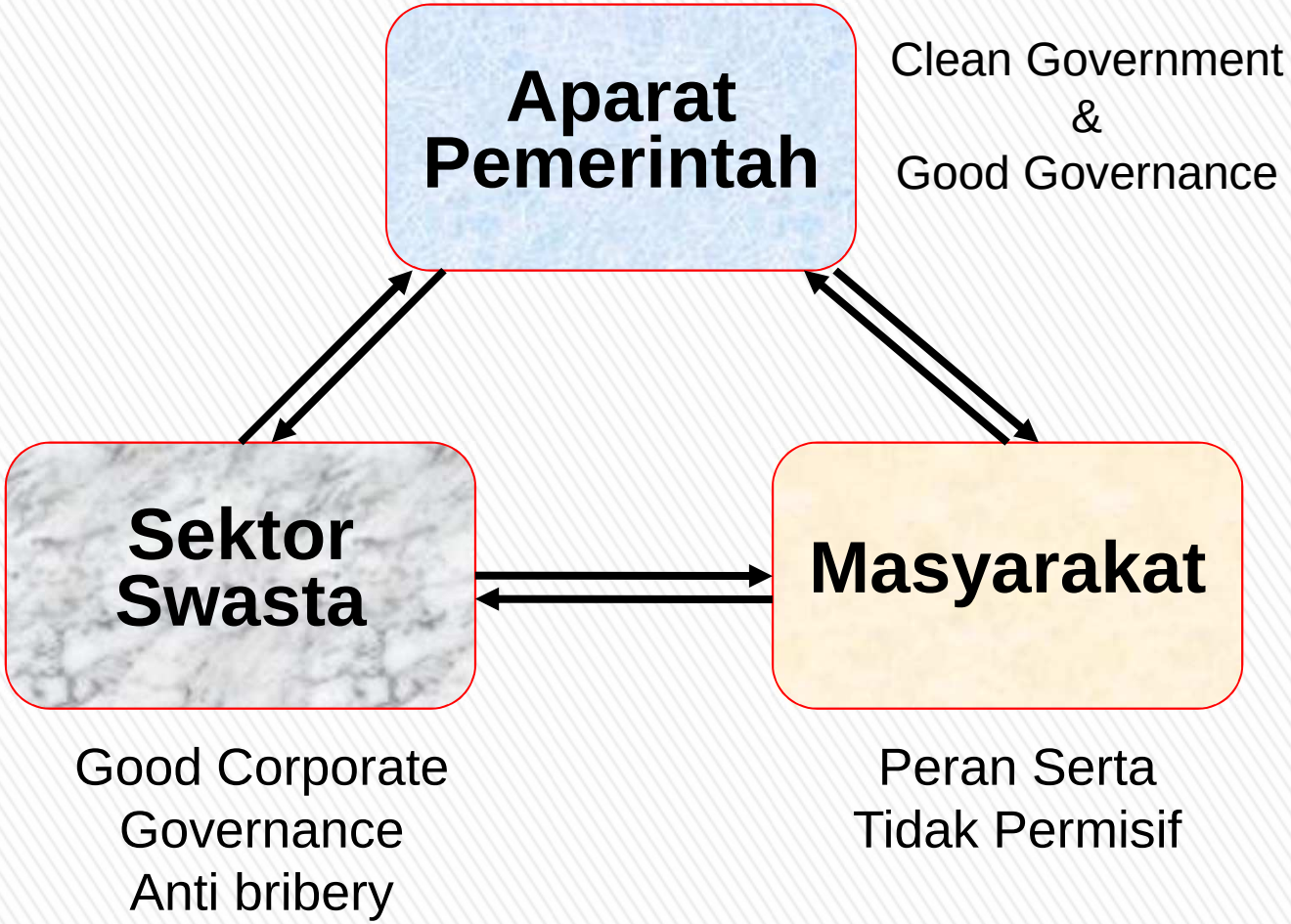

- Pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian tanpa upaya saling mendukung dan sinergitas seluruh komponen bangsa dengan disertai komitmen yang kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang BEBAS KORUPSI
- Selamat berkarya……